

**2022**



# **LAPORAN KINERJA**

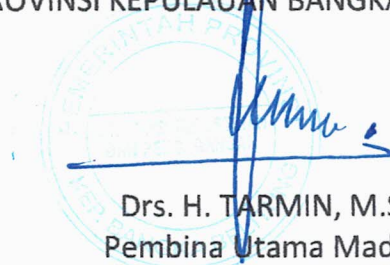
**DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Tahun 2017-2022. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Februari 2023

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196811111990091001

# Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan”:
  - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - a. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, Formulasi Perhitungan :
$$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$$
    - b. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, Formulasi Perhitungan: 
$$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$$
  - Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni Program perencanaan dan pembangunan industri, Program pengendalian izin usaha industri, dan Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
  - Capaian indikator (b.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 6 (enam) Program, yakni Program Program perizinan dan pendaftaran perusahaan, Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Program pengembangan ekspor, Program standardisasi dan perlindungan konsumen, dan Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 4,00%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 15,78%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 394,50%.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 11,22% terjadi peningkatan sebesar 4,56%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan pengembangan usaha industri hilirisasi produk.
2. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha industri besar dalam penyampaian data industri,
3. Terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen ke distributor di daerah hingga ke agen dan toko-toko
4. Terbatasnya diversifikasi produk ekspor, masih didominasi oleh ekspor Timah

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur.....	9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....	11
1.4 Isu-isu Strategis.....	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2022 .....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022.....	26
3.3. Realisasi Anggaran .....	30
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>33</b>

# Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022 .....	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis PD .....Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD ..... Tahun 2022 .....	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1 .....	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja .....	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022 .....	27

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
Gambar II.1. Website PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung....	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10

# BAB I

## Pendahuluan

### **Bab I berisi :**

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

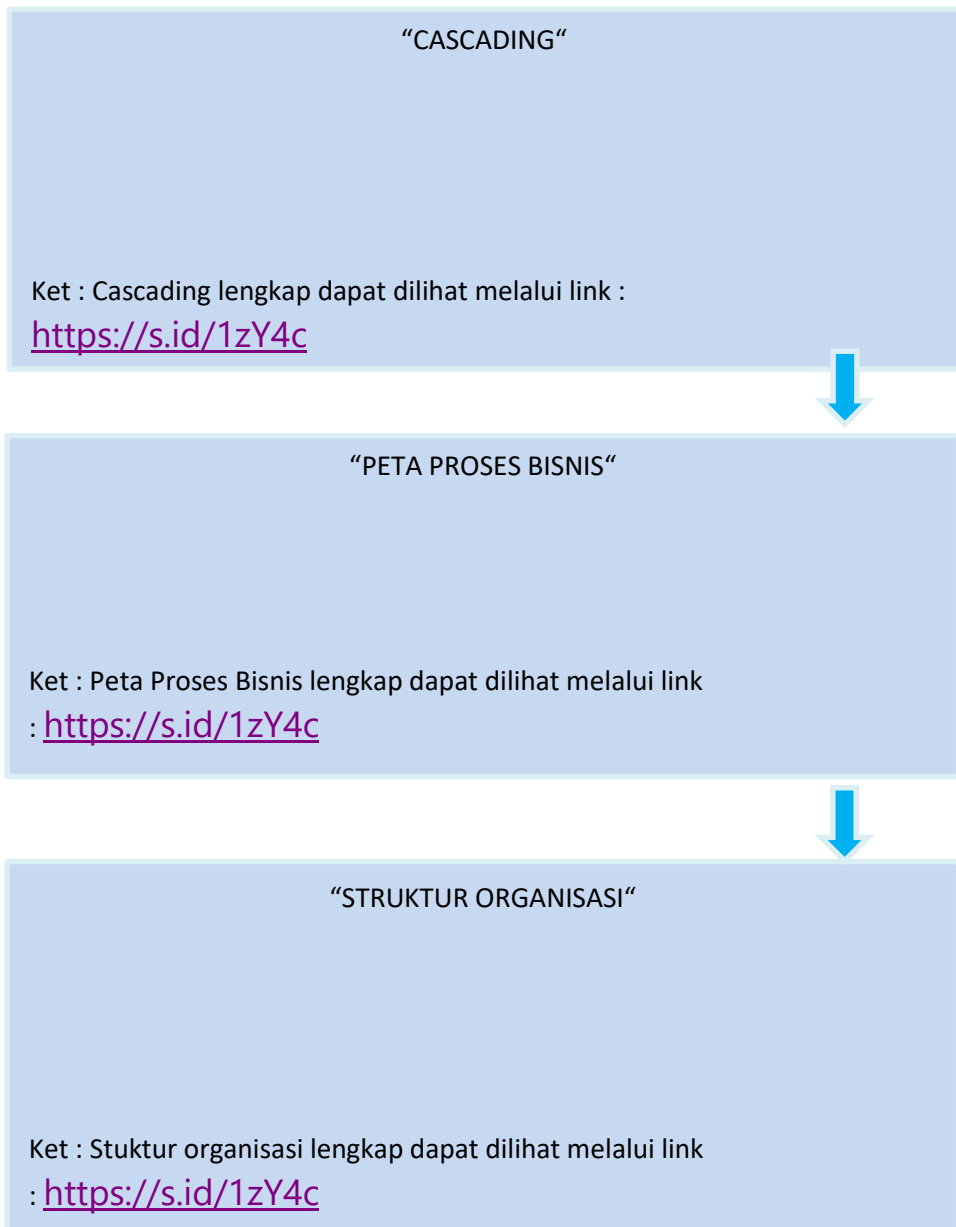
Adapun tujuan penyusunan LKJIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **1.1 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**  
*(halaman ini dapat di buat landscape)*



## 1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1.2.**  
**Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### PETA JABATAN

Ket : Peta jabatan lengkap dapat dilihat melalui link :

<https://s.id/1zY4c>

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan perdagangan”, antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan
2. Masih rendahnya pertumbuhan jumlah industri
3. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri
4. Masih rendahnya pertumbuhan perdagangan
5. Masih rendahnya pertumbuhan ekspor
6. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen

### **1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran padatahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKUTRAL</b>														
1	Kepala Dinas	1	1				1	1					1		
2	Sekretaris	1		1			1		1				1		
3	Kepala Bidang/UPTD	6	3	3			6	3	3				6		
4	Kepala Subbag/Seksi	7	2	5			7	2	5				4	3	
5	Subkoordinator	14	3	11			14	3	11				8	6	
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>														
1	Penyuluh Perindag	12	1	9	2		9	2	5	2			4	5	
2	Analisis Perdagangan	17	2	15			7	2	5				6	1	
3	Perencana	1		1			1		1				1		
4	Pranata Humas	1		1			1		1				1		
5	Pengawas Perdagangan	18	2	16			2		2				2		
6	Statistisi	1		1											
7	Pranata Komputer	3			3		1			1				1	
8	Arsiparis	2			2		1			1				1	
9	Analisis Kepegawaian / SDA Aparatur	1		1											
10	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1		1											
11	Penguji Mutu Barang	13		2	9	2	7		1	5	1		4	3	
12	Instruktur	1		1			1		1					1	
<b>C</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>														
1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2		2			2		2				1	1	
2	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1			1										
3	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1				1									
4	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2		2			2		2					2	
5	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3				3	3				3		1	2	
6	Pengadministrasi Umum	4				4	3				3		1	2	
7	Bendahara	6		5	1		6		5	1			1	5	
8	Penata Laporan Keuangan	2		2			1		1				1		
9	Pengadministrasi Keuangan	1				1	1				1			1	

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
10	Analisis Industri	9			9			6			6			4	2
11	Pengawas Standardisasi Industri	1			1			1			1			1	
12	Pengadministrasi Perizinan	2					2	2					2	2	
13	Pengelola Data Mutu dan Supervisi	1				1									
14	Analisis Standardisasi dan Teknologi	2			2			2			2				2
15	Pengelola Sarana dan Prasarana SDA	1				1		1				1			1
16	Fasilitator Perdagangan	9			9			6	1		5			5	1
17	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	2				2		2				2			2
18	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	1			1			1			1			1	
19	Pengelola Pasar	1				1		1				1		1	
20	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	2					2	2					2	2	
21	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	1				1									
22	Analisis Kimia	1			1			1				1		1	
23	Teknisi Laboratorium	1				1									
24	Pengelola Sertifikasi	1				1									
25	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2			2										
26	Pengelola Kepegawaian	2				2		1				1		1	
27	Analisis Mutu Produk	1			1			1			1				1
28	Analisis Standar Mutu Bahan dan Peralatan	1			1			1			1				1
29	Analisis Proses Akreditasi Laboratorium	1			1										
30	Perancang Grafis	3			3										
31	Pengelola Gudang	1				1		1				1			1
32	Operator Mesin	2					2								
33	Penelaah Pengembangan Usaha	1			1			1			1				1
34	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1			1										
<b>D</b>	<b>PHL</b>														
1	Pramubakti							34		1	16	3	14	15	19
2	Cleaning Service							8			1		7	6	2
3	Satpam							8			2		6	8	
4	Sopir							3					3	3	

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang (0,63%), S2 sebanyak 14 orang (8,75%), S1 sebanyak 83 orang (51,88%), D3 sebanyak 20 orang (12,50%), SLTA sebanyak 42 orang (26,25%). Komposisi pegawai laki-laki 93 orang (58,13%) dan perempuan 67 orang (41,88%), pegawai perempuan sedikit lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih sedikit dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

**Tabel I.2 Sarana-Prasarana**

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
<b>1</b>	<b>TANAH</b>		
1.01	TANAH	3	708.461.746
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1.057</b>	<b>16.688.189.081,50</b>
2.01	ALAT BESAR	14	849.865.000
2.02	ALAT ANGKUTAN	13	1.351.834.200
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	67	1.195.379.430
2.04	ALAT PERTANIAN	2	191.461.500
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	589	2.021.482.988
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	31	1.658.970.847
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	17.223.800
2.08	ALAT LABORATORIUM	154	8.189.226.492,50
2.09	ALAT PERSENJATAAN		0,00
2.10	KOMPUTER	185	1.303.744.824
2.11	ALAT EKSPLORASI		0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN		0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI		0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA		0,00
2.16	ALAT PERAGA		0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		0,00
2.18	RAMBU-RAMBU		0,00
2.19	PERALATAN OLAHRAGA		0,00
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>20</b>	<b>5.619.494.296,82</b>
3.01	BANGUNAN GEDUNG	20	5.169.494.296,82
3.02	MONUMEN		0,00
3.03	BANGUNAN MENARA		0,00
3.03	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		0,00

<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>3</b>	<b>227.226.000</b>
4.01	JALAN DAN JEMBATAN		0,00
4.02	BANGUNAN AIR	1	40.826.000
4.03	INSTALASI	1	166.400.000
4.04	JARINGAN	1	20.000.000
<b>5</b>	<b>ASETTETAPLAINNYA</b>	<b>3</b>	<b>450.000</b>
	BAHAN PERPUSTAKAAN	3	450.000
	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRA		0,00
	HEWAN		0,00
	BIOTA PERAIRAN		0,00
	TANAMAN		0,00
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		0,00
	ASET TETAP DALAM RENOVASI		0,00
<b>6</b>	<b>KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>0,00</b>
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0,00
<b>7</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>54</b>	<b>297.553.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1140</b>	<b>23.334.822.124,32</b>

Kendaraan operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan operasional, 4 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 90 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

**Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022**

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2021	17.737.917.865	105.946.710	0	0	17.843.864.575
2022	31.794.486.261	2.716.176.144	0	0	34.510.662.405

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 dibanding tahun 2021 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 16.666.797.830 dikarenakan adanya penambahan anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp 14.000.000.000 dan penambahan kekurangan gaji. Hal ini menunjukkan ada tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/128/LHE/INPTD perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mereviu kembali penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target dalam dokumen perencanaan atas keterkaitannya dengan tugas dan fungsi organisasi serta core business</li> <li>2. Menyusun rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target kinerja tidak sebatas pada pencapaian program dan kegiatan</li> <li>3. Informasi kinerja pencapaian sasaran kinerja organisasi hendaknya dapat didukung data yang andal</li> <li>4. Informasi kinerja hendaknya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja</li> </ol>	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2021 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah di reviuw pada TAPKIN tahun 2022</li> <li>2. Rencana Aksi telah disusun secara optimal, agar tercapainya tujuan, sasaran strategis dan target kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang</li> <li>3. Data yang dipakai dalam penyusunan laporan Dalev sesuai dengan data realisasi fisik dan keuangan yang diberikan bidang terkait</li> <li>4. Memanfaatkan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan dan kinerja dan penilaian kinerja</li> </ol>

# BAB 2

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :*

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
2. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan
3. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah

Adapun sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017-2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Industri	(%)		5	5	5			
		Nilai Investasi Industri	Milyar (Rp)			9,157	14,157			
		Persentase Tenaga Kerja Industri	(%)			0.82	1.37			
2.	Menurunnya Angka Inflasi	Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan				1.15	1.15			
		Nilai Ekspor	Milyar (US\$)			1,668	1,835			
		Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)				<11	<11			
		Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	(%)			35%	57%			
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen				2	3			
3	Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	(%)			146	10			
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan										
1.	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	(%)					1,00	2,00	2,00
		Persentase Pertumbuhan Perdagangan	(%)					1,00	2,00	2,00
		Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun (Rp)					14,25	14,50	14,50
		Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun (Rp)					11,50	11,75	11,75
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai RB Perangkat Daerah						80	80	80

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
		Peningkatan tata kelola industri	Peningkatan tata kelola industri
		Peningkatan tata kelola perdagangan	Peningkatan tata kelola perdagangan

## 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	<b>1.1. Program</b> Perencanaan dan Pembangunan Industri	725.599.340	1.174.590.467	448.991.127
	1.1.1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	725.599.340	1.174.590.467	448.991.127
	<b>1.2. Program</b> Pengendalian Izin Usaha Industri	81.740.561	294.066.480	212.325.919
	1.2.1. Kegiatan Penerbitan Usaha Industri (IUI), Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan	81.740.561	294.066.480	212.325.919

	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			
2. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	<b>2.1. Program</b> Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	19.269.987	13.149.987	(6.120.000)
	2.1.1. Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	19.269.987	13.149.987	(6.120.000)
	<b>2.2. Program</b> Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	188.962.224	185.729.866	(3.232.358)
	2.2.1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas	188.962.224	185.729.866	(3.232.358)
	<b>2.3. Program</b> Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	176.791.529	14.375.048.530	14.198.257.001
	2.3.1. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	140.169.528	14.338.426.820	14.198.257.292
	2.3.2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	36.622.001	36.621.710	(291)
	<b>2.4. Program</b> Pengembangan Ekspor	107.380.464	143.499.418	36.118.954

	2.4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	107.380.464	143.499.418	36.118.954
	<b>2.5. Program</b> Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	157.678.052	254.359.806	96.681.754
	2.5.1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	94.615.336	139.430.071	44.814.735
	2.5.2. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	63.062.716	114.929.735	51.867.019
	<b>2.6. Program</b> Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	57.270.235	382.487.689	325.217.454
	2.6.1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	57.270.235	382.487.689	325.217.454
3. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	<b>3.1. Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.028.394.524	16.978.481.392	1.950.086.868
	3.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.352.321	90.568.136	32.215.815
	3.1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.782.933.564	14.392.953.914	1.610.020.350
	3.1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.232.450	286.700.135	141.467.685
	3.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.979.609.303	2.130.409.303	150.800.000

	3.1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.266.886	77.849.904	15.583.018
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>		16.543.086.916	33.801.413.635	17.258.326.719

**Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	470.871.671	469.920.233	(951.438)
	<b>1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	251.638.591	250.760.823	(877.768)
	1.1.1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.785.000	9.735.000	(50.000)
	1.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.330.354	97.330.005	(349)
	1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.687.303	109.859.884	(827.419)
	1.1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.835.934	33.835.934	-
	<b>1.2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	219.233.080	219.159.410	(73.670)
	1.2.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah	219.233.080	219.159.410	(73.670)
2.	UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN	4.255.023.994	4.239.328.537	(15.695.457)
	<b>2.1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	181.758.364	307.964.084	126.205.720
	2.1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	181.758.364	307.964.084	126.205.720
	<b>2.2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	260.102.170	304.582.140	44.479.970
	2.2.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.187.855	2.237.855	(40.950.000)
	2.2.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.001.327	162.139.329	37.138.002
	2.2.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.999.772	78.155.056	73.155.284
	2.2.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.913.216	56.109.900	(24.803.316)

	2.2.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000	5.940.000	(60.000)
	<b>3.1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	3.813.163.460	3.626.782.313	(186.381.147)
	3.1.1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.813.163.460	3.626.782.313	(186.381.147)

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	(Triliun Rp)	14,50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	(Triliun Rp)	11,75	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah		80	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	

Pada tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

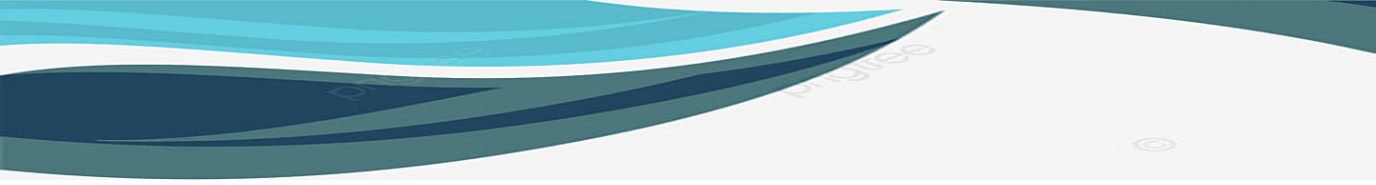
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	(Triliun Rp)	14,50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	(Triliun Rp)	11,75	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah		85,79	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	

**Keterangan Tambahan:**

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran bertambah 62,26 % sehubungan adanya Penambahan Dana Insentif Daerah (DID) Tahap I Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan realokasi anggaran Rp 10.000.000.000 untuk untuk subsidi Barang pokok (Bapok) pada pelaksanaan operasi pasar murah, dan Tahap II Rp 4.000.000.000
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga, yaitu:
  - 3.1. BTT dalam rangka - :Rp. 0
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:

- 
- 4.1. Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka: Rp. 1.282.000.000
  - 4.2. Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri: Rp. 619.013.000
  - 4.3. Kegiatan Peningkatan Perdagangan Luar Negeri: Rp. 274.210.000

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

### 4.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/METAINDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISAS	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	<p><u>Indikator:</u>                      Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u>                      Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)</p>	Triliyun Rp	-	17,924	14,500	20,910	144,21%	-	14,500
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	<p><u>Indikator:</u>                      Nilai Lapangan Usaha Perdagangan</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u>                      Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)</p>	Triliyun Rp	-	12,666	11,750	14,979	127,48%	-	11,750
3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	<p><u>Indikator:</u>                      Nilai RB Perangkat Daerah</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u>                      Nilai RB Perangkat Daerah</p>	Nilai	-	63,17	80	85,79	107,23%	-	80

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**3.1.1. Sasaran : Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan**

Kinerja sasaran 14,50 Triliyun Rp diukur dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan

**Sasaran : Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan**

Kinerja sasaran 11,75 Triliyun Rp diukur dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Perdagangan

**Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah**

Kinerja sasaran 80 Nilai diukur dengan indikator Nilai RB Perangkat Daerah Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan
3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah

Kinerja sasaran ..... diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan ..... Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 90.95% \*) contoh ) atau sebesar 109,85% dari target 83%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan..... pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun 2021 capaian kinerja sasaran ini adalah 17,924 Triliyun Rp atau sebesar 125,78% dari target 14,250 Triliyun Rp Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri (%)
2. Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri (%)
3. Prosentase data informasi industri di SIINas (%)

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai Lapangan Usaha Perdagangan Tahun 2021 capaian kinerja sasaran ini adalah 12,666 Triliyun Rp atau sebesar 110,14% dari target 11,500 Triliyun Rp Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 (enam) indikator sebagai berikut:

1. Persentase Tertib Usaha (%)
2. Persentase barang terdistribusi (%)
3. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)
4. Persentase Pertumbuhan nilai ekspor (%)
5. Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (Nilai)
6. Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri (%)

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai RB Perangkat Daerah Tahun 2021 capaian kinerja sasaran ini adalah 74,81 Nilai atau sebesar 93,51% dari target 80 Nilai Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah
2. Survey kepuasan pelayanan internal Disperindag

Kinerja Disperindag pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d2021 terhadap target 2022(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	17,924	14,500	20,910	144,21%	14,500	144,21%
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	12,666	11,750	14,979	127,48%	11,750	127,48%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	63,17	80	85,79	107,23%	80	107,23%

Analisis Ketercapaian Sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 15,45 (= Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan= 4,55\* + Presentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan= 10,9\*), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 772,50% dikarenakan penetapan target pasca pandemi covid-19 yang dalam kondisi sangat rendah 1-2% akibat dari capaian tahun 2019 dikisaran 0 s.d. 1% dan tahun 2020 -4 s.d. -6% adanya lock-down dunia sehingga dilakukan penyesuaian target capaian.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 10,24, terhadap target tahun lalu sebesar 1,5 (kolom 3) terdapat peningkatan sebesar 24,50% ini dikarenakan pertengahan tahun 2021 sebagian lock-down sudah tidak diberlakukan artinya permintaan bahan baku industri sudah mulai terjadi dan aktifitas perdagangan pun mulai

tumbuh kembali, hal ini pun berlanjut di tahun 2022.

- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (Sektor Industri Pengolahan)**

No	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	1,00	5,44	2,00	5,15	257,50%	2,00	257,50%
	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan							
	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	14,250	17,925	14,500	20,910	144,21%	14,500	144,21%
	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)							

Sumber: BPS Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (BRS No.18/02/19/Th.XVII. 6 Februari 2023)

- Program perencanaan dan pembangunan industri** dengan sasaran program:
  - Meningkatnya pertumbuhan industri mempunyai Indikator Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri (%) formula perhitungan indikator ini adalah  $\frac{\text{Pertumbuhan Usaha Industri (N)} - \text{Pertumbuhan Usaha Industri (N-1)}}{\text{Pertumbuhan Usaha Industri (N)}} \times 100\%$ . Capaian indikator kinerja adalah  $(2/2) \times 100\% = 100\%$  (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 2%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 1%.

- Meningkatnya Kemasan Produk IKM yang diproduksi mempunyai Indikator Persentase Kemasan Produk IKM yang diproduksi (%) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Kemasan Produk IKM yang diproduksi (N) / Jumlah Permintaan Kemasan (N) X 100%. Capaian indikator kinerja adalah  $(80/80) \times 100\% = 100\%$  (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 70%. (UPTD RPK)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pertumbuhan pada subkategori industri makanan dan minuman,
- b. Kenaikan produksi kelapa sawit yang menjadi bahan baku industri CPO menjadi pendorong tumbuhnya produksi CPO dan turunannya,
- c. Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha UMKM dan pembina Industri tentang kaidah penggunaan kemasan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai jual produk UMKM.
- d. Meningkatkan sosialisasi tersedianya pemanfaatan fasilitas layanan UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan dalam memberikan layanan dibidang desain dan produksi kemasan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UKMM guna menjadikan kemasan produk UMKM menjadi kemasan produk yang berdaya saing dan bernilai jual.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana terhadap mesin dan peralatan agar dapat menghasilkan produk kemasan UMKM yang berkualitas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelaku usaha UMKM.
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terhadap pegawai dan tenaga desain/operator agar mampu memberikan pelayanan

dibidang kemasan secara maksimal seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.

- g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan kemasan ditingkat kabupaten/kota untuk menjangkau para pelaku UMKM yang belum terfasilitasi oleh UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan guna pemerataan fasilitas layanan.
- h. Melakukan evaluasi dan pengawasan internal dalam rangka menjaga kualitas layanan dan mampu memberikan fasilitasi layanan terbaik bagi para pelaku UMKM.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Sinkronisasi Regulasi Industri
- b. Masih adanya masyarakat/pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang keberadaan fasilitas layanan kemasan yang dimiliki oleh UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Masih terdapat para pelaku UMKM yang kurang memahami tentang penggunaan kemasan produk yang baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan dan kebutuhan konsumen dalam rangka meningkatkan daya saing produk.
- d. Seiring dengan pesatnya fluktuasi atas harga dan jenis kemasan yang berkembang menjadikan keterbatasan varian produk yang difasilitasi dan kurang fleksibilitas terhadap perubahan dalam menetapkan pengenaan harga dan varian objek pajak terkait peraturan retribusi daerah.
- e. Keterbatasan teknologi mesin dan peralatan serta keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku UMKM.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Harmonisasi Regulasi
  - b. Promosi/ Percepatan pembangunan Kawasan Industri Sadai
  - c. Percepatan hilirisasi produk-produk dalam RPIP dengan melibatkan stakeholder terkait.
  - d. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kemasan produk secara efektif dan berkelanjutan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten/Kota.
  - e. Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan para stakeholder lainnya baik di Pemerintahan maupun Pihak lainnya dalam rangka sinkronisasi progam kegiatan yang dimiliki sehubungan dengan bantuan kepada masyarakat/pelaku UMKM berupa startup kemasan.
  - f. Melaksanakan kegiatan Desain On The Spot dalam upaya pembinaan dan memberikan layanan kemasan ditingkat kabupaten/kota untuk menjangkau para pelaku UMKM yang belum terfasilitasi oleh UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan guna pemerataan fasilitas layanan.
  - g. Upgrading skill Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sumber Daya Mesin dan Peralatan yang dimiliki.
2. **Program pengendalian izin usaha industri** dengan sasaran program Meningkatnya Industri yang sesuai Izin Usaha Industri mempunyai Indikator Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Industri sesuai IUI (N)/ Jumlah Industri sesuai IUI (Babel=50) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah  $(80/50) \times 100\% = 160\%$  dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 30%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya dukungan kebijakan pemerintah proses penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA.
- Kesadaran pelaku usaha pentingnya perizinan yang dimiliki.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- i. Belum optimalnya dukungan alokasi anggaran
- j. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pengendalian izin usaha industri
- k. Terbatasnya jumlah SDM

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor terhadap pengendalian izin usaha industry.
- b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia
- c. Peningkatan alokasi pendanaan dan sarana prasarana.

3. **Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan sasaran** program Meningkatnya data informasi industri di SIINAS mempunyai Indikator Prosentase data informasi industri di SIINas formula perhitungan indikator ini adalah  $\text{Jumlah informasi industri di SIINAS (sd. N)} / \text{Jumlah informasi industri di SIINAS (Babel=76)} \times 100\%$ . Capaian indikator kinerja adalah  $(76/76) \times 100\% = 100,00\%$  dari target sebesar 90%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 70%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan peraturan perundangan
- b. Kesadaran pelaku usaha dalam penginputan data industri
- c. Minimnya dukungan alokasi anggaran dan SDM.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Keterbatasan pengembangan usaha industri hilirisasi produk.
- b. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha industri besar dalam penyampaian data industri,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mengoptimalkan pengembangan usaha industri hilir.
- b. Optimalisasi pelaksanaan edukasi kepatuhan penyampaian data industri bagi pelaku usaha
- c. Mengoptimalkan dukungan anggaran dan SDM.

#### Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (Sektor Perdagangan)

No	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	1,00	5,78	2,00	10,63	531,50%	2,00	531,50%
	<i>Presentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan</i>							
	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	11,500	12,666	11,750	14,979	127,48%	11,750	127,48%
	<i>Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Trilyun Rp)</i>							

Sumber: BPS Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (BRS No.18/02/19/Th.XVII. 6 Februari 2023)

4. **Program Program perizinan dan pendaftaran perusahaan** dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya mempunyai Indikator kinerja Persentase Tertib Usaha formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Pelaku Usaha (N)/ Jumlah Pelaku Usaha (Babel=3) x 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah (3/3) x 100%=

100,00% dari target 3 atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatkan sinergi seluruh Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawasan di setiap sektor perdagangan terutama mengenai fasilitasi Perdagangan yang melekat atau wajib dipenuhi di setiap sektor perdagangan dalam upaya memperluas jangkauan pembinaan tentang fasilitasi perdagangan, baik kepada pelaku usaha
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan usaha perdagangan agar memiliki perizinan perdagangan
- c. Terpantaunya terhadap komitmen pelaku usaha dalam memiliki perizinan perdagangan
- d. Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan perdagangan yang mereka miliki serta memfasilitasi pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami tentang perizinan perdagangan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- b. Masih adanya pelaku usaha yang enggan untuk koordinasi kepada petugas dalam hal untuk pengurusan perizinan perdagangan

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penyelenggaraan edukasi dan advokasi pelaku usaha yang efektif; dan
- b. Memfasilitasi Penyediaan sistem pelayanan melalui elektronik.
- c. Kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam

meningkatkan sosialisasi terkait dengan pengurusan perizinan perdagangan melalui system elektronik.

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan administrasi perizinan terhadap pelaku usaha perdagangan

5. **Program peningkatan sarana distribusi perdagangan** dengan sasaran program Meningkatnya sarana dan Barang terdistribusi mempunyai Indikator Persentase barang terdistribusi formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah terdistribusi (N)/ Jumlah dikelola (babel=200Ton) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah  $(160/200) \times 100\% = 80\%$  dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 65%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Semakin baiknya sistem distribusi
- b. Meningkatnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih lemahnya sistem pengumpulan data dan informasi
- b. Tidak tersedianya pusat perdagangan grosir

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi
- b. Membuat suatu sistem informasi terpadu terkait data informasi perdagangan

6. **Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting** dengan sasaran program Meningkatnya ketersediaan Bapokting dan penyaluran pupuk bersubsidi mempunyai Indikator Persentase stabilitas

dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) formula perhitungan indikator ini adalah Nilai Koefisien Variasi < 11%. Capaian indikator kinerja adalah Koefisien Variasi 6% dari target sebesar 9%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 2,25% (capaian tahun lalu semakin kecil angka yang didapat semakin bagus).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen hingga sampai ke tingkat distributor dan agen di daerah.
- b. Faktor cuaca dan alam sangat mempengaruhi kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah.
- c. Kemampuan produsen untuk selalu memproduksi bahan pokok dan barang penting secara kontinyu.
- d. Masa panen bahan kebutuhan pokok yang sesuai jadwal panen.
- e. Distributor dan pelaku usaha yang tertib, jujur dan disiplin dalam melakukan usahanya.
- f. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait penentuan HET dan HAP di tingkat daerah.
- g. Kerjasama antar daerah terkait pemenuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk mengatasi dan mengantisipasi kelangkaan barang kebutuhan pokok.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen ke distributor di daerah hingga ke agen dan toko-toko.
- b. Faktor cuaca dan alam yang tidak menentu sehingga mempengaruhi

- distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah.
- c. Kemampuan produsen yang terkadang menurunkan jumlah produksi dikarenakan gagal panen dan lain sebagainya.
  - d. Gagal panen yang dikarenakan faktor cuaca maupun faktor penyakit.
  - e. Panic Buying masyarakat yang diakibatkan informasi yang salah tentang kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  - f. Masih terdapat distributor dan agen yang menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk kepentingan keuntungan pribadi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pemantauan tiap waktu agar distribusi dari produsen hingga sampai ke distribusi dan agen di daerah lancar.
- b. Antisipasi faktor cuaca dan alam di bulan –bulan tertentu untuk menjaga pasokan dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tetap stabil.
- c. Pemantauan masa panen barang kebutuhan pokok untuk selalu panen sesuai jadwal.
- d. Edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying apabila mendapat informasi tentang kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- e. Melakukan pengawasan kepada distributor dan agen-agen agar tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di saat terjadi kelangkaan barang.
- f. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting setiap hari.
- g. Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah untuk antisipasi dan menekan laju inflasi.

- h. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan penetapan HET dan HAP barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah.

7. **Program pengembangan ekspor** dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Non-Migas mempunyai Indikator Persentase Pertumbuhan nilai ekspor (%) formula perhitungan indikator ini adalah  $\frac{\text{Nilai Ekspor (N)} - \text{Nilai Ekspor (N-1)}}{\text{Nilai Ekspor (N)}} \times 100\%$ . Capaian indikator kinerja adalah  $(4,97/5) \times 100\% = -2,79\%$  dari target sebesar 5%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 47,51%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya diversifikasi produk ekspor
- b. Dukungan fasilitasi promosi dari pemerintah pusat/daerah
- c. Pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor daerah

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Turunnya harga pasar global untuk komoditas timah
- b. Belum maksimalnya dukungan promosi produk ekspor
- c. Masih terbatasnya diversifikasi produk ekspor
- d. Belum maksimalnya fasilitas dan sarpras pendukung kegiatan ekspor
- e. Menurunnya ketersediaan bahan baku ekspor
- f. Tingginya biaya produksi, salah satunya karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan biaya logistik ekspor.
- g. Pemberlakuan Domestic Market Obligatio (DMO) 30% pada produk ekspor turunan kelapa sawit

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor

- b. Meningkatkan promosi produk ekspor daerah
- c. Meningkatkan pembinaan pelaku usaha ekspor
- d. Mendukung peningkatan fasilitas dan sarpras pendukung kegiatan ekspor
- e. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder pendukung ekspor

8. **Program standarisasi dan perlindungan konsumen** dengan sasaran kinerja program:

- Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen dan Layanan standarisasi produk mempunyai Indikator kinerja Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (Nilai) formula perhitungan indikator ini adalah Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (N). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(42/42) \times 100\% = 100,00\%$  (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 42 atau sebesar 100%.
- Meningkatnya komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku mempunyai Indikator kinerja Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Ruang Lingkup (N)/ Jumlah Ruang Lingkup (=4) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(4/4) \times 100\% = 100,00\%$  (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 75% atau sebesar 100%. (UPTD BPSMB)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan SIMPKTN serta melakukan evaluasi penggunaan SIMPKTN agar dapat dilakukan tracking system pengaduan konsumen ke pemerintah daerah. Dengan ini, diharapkan pemanfaatan SIMPKTN sebagai portal Perlindungan Konsumen dan

Tertib Niaga (PKTN) dapat menjadi lebih optimal.

- b. Meningkatkan sinergi seluruh Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawasan di setiap sektor perdagangan terutama mengenai perlindungan konsumen yang melekat atau wajib dipenuhi di setiap sektor perdagangan dalam upaya memperluas jangkauan pembinaan tentang perlindungan konsumen, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen.
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan tentang perlindungan konsumen yang diberikan kepada masyarakat (konsumen).
- d. Menyediakan sistem informasi pengaduan konsumen yang terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga pengawas di setiap sektor perdagangan karena pengawasan perdagangan di setiap sektor tidak hanya berfokus di Kementerian Perdagangan melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh Kementerian/Lembaga sesuai bidang tugas dan fungsinya. Keberdayaan konsumen dapat dicapai dengan 2 hal, yaitu perlindungan konsumen (melalui penetapan peraturan perundangan dan pelaksanaan fungsi pengawasan) dan pendidikan konsumen (melalui pembinaan menjadi konsumen cerdas/berdaya). Dengan adanya sistem informasi pengaduan yang terintegrasi akan memudahkan Kementerian Perdagangan dalam mendistribusikan pengaduan kepada Kementerian/Lembaga yang membidangi.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait perlindungan konsumen, dimana pemerintah dan instansi terkait harus memprioritaskan perlindungan konsumen pada produk yang berdampak luas seperti obat dan makanan karena dikonsumsi secara

luas. Demikian pula penegakan hukum pada kasus-kasus konsumen yang berdampak luas harus dilaksanakan dengan prioritas yang tinggi untuk menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang memiliki intensi merugikan konsumen atau untuk menghindari kelalaian pelaku usaha yang berdampak serius.

- f. Peningkatan pemahaman masyarakat akan Hak-nya sebagai konsumen untuk berani melaporkan setiap kerugian atas transaksi pembelian/konsumsi yang dilakukan, terutama kerugian yang berdampak luas kepada masyarakat.
- g. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- h. Penambahan/Peningkatan akreditasi Laboratorium Pengujian untuk komoditi Potensial

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui lembaga perlindungan konsumen. Sehingga perlu adanya edukasi dan sosialisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia kepada masyarakat melalui pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

- c. Ketersediaan regulasi layanan pengujian kesadaran pengusaha atas produk ber SNI masih rendah.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif; dan
- b. Penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, andal, dan terpercaya.
- c. Kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan sosialisasi atas keberadaan lembaga perlindungan konsumen, khususnya keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa konsumen, baik lokasi kantor, fungsi, kewenangan, dan media penyampaian pengaduan/sengketa konsumen yang dimiliki.
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat akan Hak-nya sebagai konsumen untuk berani melaporkan setiap kerugian atas transaksi pembelian/konsumsi yang dilakukan, terutama kerugian yang berdampak luas kepada masyarakat.
- e. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- f. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan pengenalan kepada konsumen mengenai lokasi dan fungsi dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, mulai dari Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), termasuk Kementerian Perdagangan selaku leading sector perlindungan konsumen.

- g. Mengidentifikasi komoditi potensial untuk SNI/dan Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/HACCP atau standar lainnya yang relevan
- h. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen lada dan pengembangan produk turunan dari Lada

9. **Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri** dengan sasaran program:

- Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai Indikator Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri (%) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah produk, yang dipasarkan (N)/ Jumlah produk, yang dipasarkan (tabel=9) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah  $(8/8) \times 100\% = 100,00\%$  dari target sebesar 60%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 40%.
- Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai Indikator Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri (%) formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Produk IKM yang dipasarkan (N) / Jumlah Produk IKM (N) X 100%. Capaian indikator kinerja adalah  $(80/80) \times 100\% = 100,00\%$  dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 70%. (UPTD RPK)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Peran aktif para pelaku UMKM dalam mengikuti program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan

perdagangan Provinsi Kep Babel maupun kemendag RI.

- b. Kualitas media pendukung pemasaran produk seperti kemasan dan media promosi,
- c. Kegiatan promosi produk yang tepat sasaran,
- d. Adanya wadah pemasaran yang dikelola secara baik dan profesional,
- e. Terjalin kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder yang mendukung pemasaran produk,
- f. Adanya sosialisasi peningkatan kualitas usaha dan produk.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Ditingkat provinsi, pelaku usaha lokal mendapat ancaman dari masuknya berbagai macam produk nasional,
- b. Ditingkat nasional, masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan pemanfaatan sosial media dan marketplace sebagai wadah promosi dan pemasaran produk,
- c. Masih minimnya kesadaran atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara mandiri. Pelaku usaha cenderung sangat bergantung dengan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait,
- d. Masih minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membangun citra dan kualitas produk, sehingga berakibat minimnya daya saing produk dipasar nasional,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Diadakannya kegiatan mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal dari Bangka Belitung ke luar daerah.
- b. Pengembangan kegiatan promosi dan pemasaran serta Sosialisasi Bangka Buatan Indonesia melalui kegiatan pameran lokal.
- c. Menciptakan wadah pemasaran yang profesional untuk menjangkau

- pasar lokal maupun nasional,
- d. Melakukan kegiatan promosi yang tepat sasaran
  - e. Meningkatkan kualitas lembaga yang mendukung peningkatan kualitas media pemasaran produk, seperti: UPTD Rumah Promosi dan Kemasan,
  - f. Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait guna mendukung pemasaran produk,
  - g. Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap peningkatan kualitas usaha dan produk.

#### Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (Reformasi Birokrasi)

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80	63,17	80	85,79	107,23%	80	107,23%
	<i>Nilai RB Perangkat Daerah</i>							
	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	80	63,17	80	85,79	107,23%	80	107,23%
	<i>Nilai RB Perangkat Daerah</i>							

10. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** kinerja program Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah mempunyai Indikator kinerja Nilai RB Perangkat Daerah (Nilai) formula perhitungan indikator ini adalah Nilai RB Perangkat Daerah (N). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(31,14/36,30) \times 100\% = 85,79\%$  (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 80 atau sebesar 85,79%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Sinergitas dan koordinasi SDM Sekretariat dengan bidang terkait

- sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang ada,
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan sistem/aplikasi yang telah disediakan/diterapkan,
  - c. Tersedianya fasilitas sarana prasarana kantor yang mendukung (komputer dan peralatannya, jaringan internet,dll
  - d. SDM yang berkompeten sesuai peta jabatan yang telah ditetapkan,
  - e. Ketersediaan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan unit kerja.
  - f. Untuk factor pendukung bias dilihat berdasarkan Area Perubahan yang ada di dokumen RB, antara lain:
    - 1) AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
      - Peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai satuan kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi
      - Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja satuan kerja
      - Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan
    - 2) AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      - Penurunan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan satuan kerja
      - peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan satuan kerja
    - 3) AREA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
      - Penurunan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal satuan kerja
      - Peningkatan kapasitas satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
    - 4) AREA PENATAAN TATALAKSANA
      - Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses

- penyelenggaraan manajemen pemerintahan di satuan kerja.
- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di satuan kerja
  - Peningkatan kinerja di satuan kerja
- 5) AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
- Peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur masing-masing satuan kerja;
  - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur masing-masing satuan kerja
  - Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing satuan kerja
  - Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing-masing satuan kerja
  - Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing satuan kerja
- 6) AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS
- Meningkatnya kinerja satuan kerja
- 7) AREA PENGUATAN PENGAWASAN
- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing satuan kerja.
  - Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing satuan kerja
  - status Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing satuan kerja
- 8) AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
- meningkatnya kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada satuan

kerja.

- meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada satuan kerja.
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing satuan kerja.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Tugas dan Fungsi yang tumpang tindih, fungsi yang belum terakomodir, fungsi yang tidak efektif, volume beban kerja unit kerja, unit kerja yang tidak inline dengan sasaran kinerja PD ,
- b. Terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan satuan kerja
- c. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di satuan kerja,
- d. Kurangnya SDM yang kompeten sesuai peta jabatan yang telah ditetapkan,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan Analisa jabatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal satuan kerja
- b. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan satuan kerja
- c. Mengoptimalkan dukungan anggaran dan SDM.
- d. Memfasilitasi Penyediaan sistem pelayanan melalui elektronik.
- e. Mengupayakan pelatihan dan sertifikasi terhadap SDM yang ada.

**Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp) Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)	14,500	20,910	144,21%
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp) Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)	11,750	14,979	127,48%
3.	Nilai RB Perangkat Daerah Nilai RB Perangkat Daerah	80	85,79	107,23%

**Sumber:** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2022, Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022

## DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.	"Foto"	.....
2.	"Foto"	.....

### 4.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliun Rp)	14,500	20,910	144,21%	5.095.439.260	4.093.054.897	80,33%	1.002.384.363
	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliun Rp)	11,750	14,979	127,48%	15.881.398.790	3.109.077.468	19,58%	12.772.321.322
	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	80	85,79	107,24%	17.533.824.355	17.149.319.448	97,81%	384.504.907
<b>Total Belanja</b>						38.510.662.405	24.351.451.813	63,23%	14.159.210.592 <b>(efisiensi)</b>

**Sumber:** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2022, Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2022 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 38.510.662.405, terealisasi Rp 24.351.451.813 atau 63,23% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 14.159.210.592 yang bersumber dari:

- Sisa pembiayaan dana DID dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah yang dikururkan pada Triwulan IV sebesar Rp 14.000.000.000 dengan realisasi pelaksanaan pada akhir tahun 2022 Rp 1.489.200.000, bila tanpa DID capaian realisasi sebesar 93,27%
- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas

#### **4.3 Inovasi**

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi SI KELASAN (Sistem Informasi Kendali dan Layanan Kemasan) yang berbasis web based apps, yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha IKM se- Provinsi Babel dalam memesan kemasan tanpa harus datang ke UPTD Rumah Promosi dan Kemasan guna menjangkau IKM/UMKM di seluruh Babel

#### **4.4 Penghargaan**

Sepanjang Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst;

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam Rapat Internal bulanan dan koordinasi melalui WAG.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, dst terkait tindak lanjut dari pelaksanaan Progran dan Kegiatan yang di danai APBN dan Dekon;
2. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target sasaran strategis perangkat daerah;
3. Menyiapkan ..... dalam mendukung .....;
4. ....;



# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2017-2022**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Industri	5	5	5		
			Nilai Investasi Industri		9,157	14,157		
			Persentase Tenaga Kerja Industri		0.82	1.37		
2.	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Masyarakat	Menurunnya Angka Inflasi	Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan		1.15	1.15		
			Nilai Ekspor		1,668	1,835		
			Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)		<11	<11		
			Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas		35%	57%		
			Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen		2	3		
		Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah		146	10			
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan				1,00	2,00
			Persentase Pertumbuhan Perdagangan				1,00	2,00
			Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan				14,25	14,50
			Nilai Lapangan Usaha Perdagangan				11,50	11,75
2.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai RB Perangkat Daerah				80	80

*Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022*

“Scan dokumen PK Kepala Perangkat Daerah”

<https://s.id/1zY4c>

*Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2021*

Scan Dokumen LHE Akuntabilitas Perangkat Daerah

<https://s.id/1zY4c>

*Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021*

*Scan Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021*

<https://s.id/1zY4c>

*Lampiran 5. SK IKU ... (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN).....  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Scan IKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

<https://s.id/1zY4c>

